

**THE STRATEGY OF NATIONAL VALUES DEVELOPMENT BASED ON  
RELIGIOUSITY FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) IN PURWAKARTA  
REGENCY**

**STRATEGI PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN  
BERBASIS KEAGAMAAN TERHADAP FRONT PEMBELA ISLAM  
(FPI) DI KABUPATEN PURWAKARTA**

**Ating Supardi<sup>1</sup>, Sapriya<sup>2</sup>, Cecep Darmawan<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Pascasarjana UPI

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Pascasarjana UPI

E-mail: rhen4rdi@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

*This study used a qualitative approach with a phenomenological method for assessing the relationship between subjective and objective reality of meaning in everyday life. The results showed that patriotism was seen as a manifestation love of Allah, therefore FPI have a core program it relevant to build national values, include; hisbah, halaqoh, and syahriaan. Recommendations offered include; increase the participation of nation building through involvement in various social activities, enhance cooperation, communication and coordination with various stakeholders of mental and moral development efforts of generations, and necessity to build communities of people that support the implementation of development in all areas.*

**Keywords : Civil Organization, National Values, Religious Values**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi karena mengkaji keterkaitan antara makna subyektif dan realitas obyektif dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecintaan terhadap tanah air dipandang sebagai wujud kecintaan terhadap Allah SWT, karena itu FPI mempunyai program inti yang relevan dengan upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan diantaranya; hisbah, halaqoh, dan syahriaan. Rekomendasi yang ditawarkan meliputi; perlunya meningkatkan partisipasi terhadap pembangunan bangsa melalui pelibatan diri dalam berbagai kegiatan sosial, perlu peningkatan kerjasama, komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait upaya pembangunan mental dan moral generasi bangsa, serta perlunya membangun komunitas-komunitas yang berfungsi sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan di segala bidang.*

**Kata Kunci : Organisasi Kemasyarakatan, Nilai Kebangsaan, Nilai Keagamaan**

Degradasi nilai-nilai kebangsaan saat ini menjadi isu yang hangat dibicarakan di pelbagai media, baik televisi, koran, radio, dan internet. Menurunnya nilai toleransi, moderasi, penghargaan akan adanya pluralitas, serta terkikisnya semangat cinta tanah air menjadikan pentingnya dilakukan suatu upaya untuk memberikan pencerahan sosial kepada masyarakat ikhwal pembangunan nilai-nilai kebangsaan.

Tergerusnya nilai-nilai luhur bangsa semakin mendorong masyarakat Indonesia pada suatu arah yang semakin menjauhi cita-cita kebangsaan kita. Sebuah cita-cita yang ingin mengantarkan masyarakat bangsa pada suatu titik kemulyaan di hadapan bangsa sendiri dan bangsa lain. Sebuah bangsa yang berkeadaban di tengah fenomena multikulturalitas bangsa yang ada. Selain itu, tergerusnya nilai-nilai luhur bangsa tersebut akan mendorong

terjadinya implikasi yang parah secara sosial (Taufiq, 2008: 1). Cidera sosial yang selama ini terjadi ditandai oleh munculnya pelbagai macam sikap sosial yang ingin menang sendiri (individualistis), munculnya ego pribadi dan kelompok yang menggadaikan semangat persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa, sikap main hakim sendiri, serta munculnya perasaan “saya yang paling benar” dan lain sebagainya.

Konsensus nasional yang selama ini menjadi dasar dalam penanaman, penumbuhan, dan pengembangan rasa, jiwa dan semangat kebangsaan serta memberikan panduan, tuntunan dan pedoman bagi bangsa Indonesia melakukan perjuangan guna mencapai cita-cita nasionalnya, ternyata mengalami suatu kemunduran (degradasi). Ditambah dengan kebijakan pemerintah memberlakukan otonomi daerah semakin membuat kecemasan tergerusnya nasionalisme dan munculnya etnosentrisme (Komalasari, 2007:553). Itulah yang sebenarnya dikhawatirkan Bung Hatta ketika merancang sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama Bung Karno, bahwa kedepan tantangan besar bangsa yang telah menjadi satu dalam kerangka Republik Indonesia ini adalah terjadinya disintegrasi, perang antar-etnik, ras, dan agama sebagai konsekuensi logis dari negara multikultur. Kekhawatiran Hatta senada dengan yang dijelaskan Naisbitt (1994: 15) bahwa masalah suku bangsa ataupun etnis dapat menjadi boomerang bagi bangsa yang kurang arif dalam melakukan kebijakan politiknya.

Sekaitan dengan itu, dapat diyakini bahwa tatanan sosial kebangsaan Indonesia akan semakin tidak terarah dan terkendali. Proses sosial kebangsaan yang demikian turut berkontribusi terhadap semakin terpuruknya bangsa Indonesia. Bersamaan dengan hal itu, proses transformasi nilai-nilai kebangsaan seperti nilai toleransi, moderasi, inklusivitas, solidaritas, dan kesediaan untuk berkerja sama dengan warga bangsa yang lain merupakan sesuatu yang diniscayakan. Lickona (1992: 14) menjelaskan 10 tanda perilaku manusia yang menunjukkan ke arah kehancuran suatu bangsa, meliputi; meningkatnya kekerasan, ketidakjujuran yang membudaya, semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru dan figur pemimpin, pengaruh *peer group* terhadap tindakan kekerasan, meningkatnya kecurigaan dan kebencian, penggunaan bahasa yang memburuk, penurunan etos kerja,

penurunnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, meningginya perilaku merusak diri, dan semakin kaburnya pedoman moral.

Kesepuluh kriteria sebagai gejala kehancuran suatu bangsa tersebut, jika diperhatikan secara seksama selaras dengan kehidupan bangsa Indonesia pada masa sekarang yang sedang dilanda krisis dalam berbagai bidang kehidupan. Terjadinya krisis warga negara merupakan dampak dari perilaku yang tidak mengindahkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan, falsafah, dan pedoman hidup dalam memperkokoh jatidiri bangsa. Kekuatan nasionalisme bangsa semakin lemah. Sebaliknya, kosmopolitanisme mengalami peningkatan yang signifikan, etnisitas mencuat dan mengakar dalam tubuh individu, sehingga mengalahkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Melihat pelbagai gejala yang muncul sebagai tanda melemahnya nilai-nilai kebangsaan, diperlukan adanya penguatan kembali nilai-nilai kebangsaan dan semangat cinta tanah air dalam tubuh bangsa Indonesia oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi, menempatkan rakyat sebagai kekuatan utama pembangunan bangsa. Karena itu, prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat seyogyanya dilaksanakan secara kaffah dan penuh tanggung jawab. Gerakan sosial yang dibangun oleh rakyat diwujudkan melalui pembentukan komunitas/kelompok masyarakat atau lazim dikenal dengan istilah Ormas (Organisasi Kemasyarakatan). Keberadaan organisasi dimaksud tidak lain adalah untuk memperkuat nilai-nilai ideologis bangsa demi tercapainya masyarakat madani. Salah satu Ormas yang konsen terhadap pembangunan nilai-nilai kebangsaan adalah Front Pembela Islam (FPI) yang dalam praksisnya didasari oleh semangat jihad yang sarat nilai religiusitas.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut; *Pertama*, terjadinya degradasi nilai-nilai kebangsaan di masyarakat. *Kedua*, semakin kaburnya pedoman moral sebagai landasan masyarakat dalam berperilaku. *Ketiga*, penumbuhkembangan nilai-nilai kebangsaan membutuhkan peran berbagai aspek, baik pemerintah maupun masyarakat. *Keempat*, perlu adanya pengkajian mengenai peran organisasi kemasyarakatan dalam membangun

nilai-nilai kebangsaan. Berangkat masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pengembangan nilai-nilai kebangsaan berbasis keagamaan pada organisasi kemasyarakatan, khususnya yang dilaksanakan Ormas Islam FPI (Front Pembela Islam). Mengingat luasnya kajian penelitian, maka penulis membatasi penelitian menjadi beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan Ormas Islam FPI tentang nilai-nilai kebangsaan?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan Ormas Islam FPI dalam mengembangkan nilai-nilai kebangsaan?
3. Hambatan apa yang ditemui Ormas Islam FPI dalam mengembangkan nilai-nilai kebangsaan?
4. Upaya apa yang dilakukan Ormas Islam FPI untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam pengembangan nilai-nilai kebangsaan?

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi karena mengkaji pola atau keterkaitan antara makna subyektif dan realitas obyektif dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan paradigma fenomenologi dalam memahami fenomena atau realitas tertentu, akan menempatkan realitas sebagai konstruksi sosial kebenaran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian meliputi pengurus dan anggota Ormas Islam FPI Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, dan masyarakat Kabupaten Purwakarta yang dipilih secara purposif. Data yang terkumpul kemudian di analisis melalui tiga tahap, meliputi reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Pengetahuan Ormas Islam FPI tentang Nilai-Nilai Kebangsaan

Nilai-nilai kebangsaan merupakan dua hal yang penting untuk ditumbuhkembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Ormas Islam FPI sebagai salah satu organisasi berbasis agama mempunyai tekad untuk membumikan nilai-nilai kebangsaan pada masyarakat Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan syariat

Islam. Terkait dengan pandangan Ormas Islam FPI tentang nilai-nilai kebangsaan, peneliti melakukan wawancara dengan pengurus FPI Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan DSn diperoleh informasi bahwa pada dasarnya FPI lahir bertujuan untuk membangkitkan cinta terhadap masyarakat, negara dan agama. Hal itu dijelaskan DSn tercermin dari misi utama yang diemban FPI. *Pertama*, sebagai pelayan masyarakat (*Khodimul Ummah*) FPI berusaha merespon setiap keluhan kesah masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam menyelesaikannya. *Kedua*, menjadi benteng terdepan untuk membela agama Islam (*Nashirudin*) terutama dalam menghadapi moralitas anak bangsa yang saat ini terjadi dekadensi. *Ketiga*, meluruskan moral yang merupakan ruh agama dan suatu benteng untuk menciptakan kondisivitas keadaan masyarakat. Ditegaskan DSn bahwa untuk menciptakan masyarakat madani yang adil makmur tidak dapat tercipta jika kemerosotan/dekadensi moral terjadi dimana-mana.

Senada dengan DSn, DS juga menjelaskan bahwa implementasi nilai-nilai kebangsaan amat penting untuk mewujudkan kesadaran kolektif sebagai sebuah bangsa yang bermartabat, sehingga akan terwujud masyarakat yang aman, tentram, nyaman dan sejahtera. Karena itu, menurut DS perlu upaya penanaman nilai-nilai kebangsaan secara terus-menerus kepada masyarakat sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa yang sebagaimana kita ketahui saat ini mulai terjadi pergeseran. Implementasi kecintaan FPI terhadap negara dijelaskan DSn senantiasa berpedoman pada Al Qur'an dan juga Al-Hadist, dimana Al-qur'an dan Al-Hadist menjelaskan beberapa kewajiban umat islam salah satunya mencintai tanah air.

Pentingnya penumbuhkembangan nilai-nilai kebangsaan menurut DSn didasari oleh agama atau keyakinan sebagaimana dijelaskan Imam Ghozali "*addienu aslun*" yang artinya "agama merupakan pokok daripada segala yang pokok." Artinya yang bisa mengembangkan rasa cinta kepada negara, cinta kepada masyarakat, serta dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dan ajaran agama sebagai barometernya. Ditambahkan DSn bahwa bila agama menjadi barometer segala perbuatan dan tingkah laku sebuah bangsa, maka nilai-nilai perjuangan semata-

mata dilakukan untuk ibadah terutama dalam mencapai ridho Allah SWT.

Pendapat DSn senada dengan ASS yang memandang bahwa dilihat dari kaca mata agama, FPI memandang kecintaan terhadap tanah air hal yang sangat ditekankan. Ia menyebutkan salah satu hadits yang berkaitan dengan pentingnya nilai-nilai perjuangan itu dikembangkan, yaitu hadits yang mengatakan “*hubbul wathon minal iman*” yang artinya cinta tanah air sebagian daripada iman. Karena itu, membela daripada tanah air, membela eksistensi tanah air, dan membela persatuan dan kesatuan bangsa merupakan amanat-amanat ilahiyah bukan hanya amanat konstitusional saja. Sebagaimana DS yang menyatakan bahwa cinta tanah air merupakan wujud dari kecintaan umat muslim terhadap Tuhan-Nya. Karena itu, dijelaskan IH bahwa FPI lebih konsen mengembangkan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar berkembangnya nilai-nilai kebangsaan, menurut IH apabila masyarakat sudah mencintai agamanya maka merekapun akan mencintai tanah airnya.

Kecintaan terhadap tanah air dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan masyarakat perlu terus dilakukan. Pentingnya hal tersebut dijelaskan oleh ASS karena identitas dari suatu masyarakat adalah sejauhmana mereka mengenal kepada dirinya sendiri, mengenal kepada tanah airnya dan mengenal kepada budayanya. ASS menambahkan bahwa nilai kecintaan terhadap tanah air pada tataran implementasi, dewasa ini mengalami degradasi hal tersebut ditunjukkan oleh menurunnya kualitas nasionalisme dari masyarakat.

Pendapat berbeda dijelaskan IH yang memandang bahwa nilai kebangsaan harus mengedepankan nilai agama, jangan sebaliknya agama digadaikan untuk nilai-nilai kebangsaan. Menurut IH, Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim harus mengedepankan nilai keagamaan. Nilai kebangsaan penting adanya, karena itu FPI akan memperjuangkan NKRI. Ditegaskan IH isu miring yang selama ini menimpa FPI hanya sentimen negatif pihak-pihak yang tidak suka keberadaan FPI. FPI tidak menolak keberadaan budaya asing sepanjang tidak berbenturan dengan agama Islam.

Berkaitan dengan karakteristik yang harus dimiliki warganegara sebagai implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, menurut DSn adalah

karakter agamis, yakni suatu masyarakat yang secara benar melaksanakan patokan agamanya masing-masing. Karakter agamis menjadi nilai pokok yang harus dikembangkan karena sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” artinya sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembukaanya saja kita harus mengingat Allah SWT selain itu kegiatan apapun kita harus bermuara kepada Allah SWT.

Senada dengan IH yang menjelaskan karakter agamis harus dikedepankan karena apabila masyarakat sudah mempunyai nilai-nilai keagamaan yang kuat sudah pasti mereka akan mempunyai nilai-nilai kebangsaan, setiap ajaran yang mereka anut pasti akan mengajarkan betapa pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Berbeda dengan DS yang menjelaskan bahwa karakter yang harus dimiliki warganegara adalah mencintai tanah airnya dan masyarakat yang mampu mengelola sumber daya alamnya untuk kemaslahatan umat hal ini sejalan dengan UUD 1945. Selain hal tersebut tadi, warga negara juga harus mempunyai sikap yang saling menghargai pendapat orang lain dan bermasyarakat, adanya kesetiakawanan sosial, kebersamaan sosial dan kesadaran akan hukum.

Perwujudan nilai-nilai kebangsaan banyak ragamnya, hal tersebut dikemukakan oleh DS bahwa banyak sekali untuk mewujudkan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bisa dengan kerja bhakti di lingkungan kita masing-masing, ikut menjaga keamanan lingkungan yaitu dengan cara siskamling dan tidak lupa harus menjaga dan menjalankan kebersihan, keindahan dan ketertiban. Senada dengan ASS yang mengatakan bahwa wujud cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari dapat dibuktikan dengan menjunjung tinggi hukum-hukum yang berlaku di masyarakat.

Lain halnya dengan IH yang tetap mendasarkan segala hal berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ke dalam ajaran agama. Dijelaskan IH bahwa wujud cinta tanah air adalah menjadikan agama sebagai aspek utama dalam menjaga moral bangsa. Hal itu menurut IH senada dengan misi FPI, yakni “*menegakkan amar mar’uf nahi mungkar*” yaitu mencegah penyakit masyarakat yang akan menghilangkan cinta tanah airnya, karena mereka jauh dari nilai-nilai keagamaan maka rasa cinta tanah airnya tidak akan tumbuh. Hal-hal yang dilakukan FPI sebagai wujud

kecintaan terhadap tanah air meliputi; (a) Mewujudkan agar pemuda-pemuda harapan bangsa agar menjauhi perbuatan maksiat seperti miras. Bahwa minuman keras adalah merupakan biang dari segala kejahatan, (b) Mengawal atau menjadi kelompok penekan agar pejabat atau pimpinan daerah bersih dari korupsi.

Hal utama yang harus dibangun untuk mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air adalah melalui pembangunan aqidah masyarakat. Ditegaskan DSn bahwa menjaga aqidah bukan berarti FPI bersebrangan dengan negara dengan HAM, selama berseberangan dengan aturan negara agama apapun itu seperti contoh Ahmadiyah, Syiah atau aliran sesat lainnya. Bahwa Ahmadiyah, Syiah, LDII itu sudah di vonis oleh MUI sebagai aliran sesat dan kredibilitas MUI itu sebuah lembaga yang diakui oleh negara, maka FPI sebagai pelaksana di lapangan berusaha mengaktualisasikan apa yang dilarang oleh negara melalui Lembaga MUI.

Untuk mewujudkan warganegara yang cinta terhadap tanah airnya, maka mutlak dikembangkan kesadaran kolektif sebagai sebuah bangsa. Terkait dengan hal tersebut, menurut DSn jika individu tidak mempunyai kesadaran kolektif maka sebutan bagi individu tersebut adalah “*zuru*”. Pentingnya mengembangkan kesadaran kolektif dijelaskan pula oleh IH yakni jika antar warganegara tidak bersatu membangun bangsanya, maka sampai kapanpun jati diri bangsa tidak akan muncul. Senada dengan ASS yang mengatakan bahwa kesadaran kolektif suatu bangsa mempunyai posisi penting, terutama dalam menunjang kemajuan bangsa. Analog dengan IH dan ASS, DS pun memandang kesadaran kolektif sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

### **Strategi Ormas Islam FPI dalam Membangun Nilai-Nilai Kebangsaan**

Pembangunan nilai-nilai kebangsaan merupakan kewajiban seluruh warganegara Indonesia, terutama dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. FPI sebagai Ormas berlandaskan agama Islam melakukan upaya-upaya pembangunan nilai kebangsaan dengan menegakkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan.. Berdasarkan penuturan DSn, saat

ini kegiatan yang dilakukan FPI saat ini adalah *halaqoh, syahriahan, dan hisbah*.

Pertama, “*halaqoh*” merupakan kegiatan pembinaan masyarakat berupa pengajian yang dilaksanakan seminggu sekali dan dilaksanakan oleh kelaskaran yang kegiatannya berisi pembelajaran kitab, pembekalan wawasan, pembinaan mental, dan pemurnian agama. Pembelajaran kitab bertujuan agar anggota FPI mampu dan bisa mengkaji kitab serta lebih memahami tentang ajaran agama Islam. Pembekalan wawasan bertujuan untuk menghadapi segala kemungkinan tantangan zaman, menghadapi perang pemikiran (*ghuzwul fikri*) sehingga anggota FPI lebih siap lagi dalam menghadapi pengaruh arus globalisasi. Pembinaan mental/moral berisi pemberian materi wawasan kebangsaan seperti pemberantasan miras, prostitusi, perjudian agar moral anak bangsa sebagai generasi penerus dapat di cegah dari hal-hal yang merusak moral. Apapun yang FPI lakukan intinya adalah untuk menjadi bagaimana kita berwawasan kebangsaan sajiannya berdasarkan syariat agama Islam. Seperti contohnya gerakan FPI memberantas miras maka benang merahnya dengan nilai-nilai kebangsaan sangat erat sekali, artinya dengan memberantas peredaran miras maka kita pun memberantas penyakit yang merongrong segi kebangsaan dari generasi muda.

Kedua, “*syahriahan*” merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan di minggu pertama. Kegiatan ini berisi pembahasan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi, seperti ada keluhan dari masyarakat tentang adanya tempat yang dijadikan tempat pemaksiatan. *Syahriahan* diisi dengan pembicaraan seputar Program FPI, sebagai sarana evaluasi kebijakan dan program kerja FPI, pembasahan permasalahan yang sedang terjadi, pencarian solusi masalah, media silaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat, serta sebagai sarana sosialisasi dan konsolidasi. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini bukan hanya dari unsur FPI, tetapi juga masyarakat setempat.

Ketiga, *hisbah*, merupakan kegiatan/program FPI yang bertujuan untuk menegakkan “*amar ma'ruf nahi mungkar*” meliputi monitoring, investigasi, melakukan teguran, pemberian surat peringatan, serta melakukan razia tempat-tempat yang dinilai meresahkan masyarakat dan melenceng dari ajaran agama islam dan/atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku. *Hisbah* merupakan program prioritas dari ormas islam FPI dengan berkoordinasi bersama Kepolisian, Dandim dan unsur Pemerintah Daerah yang di wakili oleh Satpol PP, Hisbah dilaksanakan dengan terlebih dahulu dilakukan monitoring investigasi oleh BIF (Badan Investigasi Front) kemudian BIF melayangkan surat teguran, apabila tidak ada tanggapan maka diberikan surat peringatan sampai ketiga dan apabila masih membandel maka jalan terakhir dilakukan eksekusi (Pembubaran).

Razia sebagaimana dijelaskan DSn merupakan eksekusi terakhir dari *hisbah*. Terdapat beberapa langkah/tahap yang dilakukan FPI sebelum melaksanakan razia, misalnya ada suatu permasalahan maka akan dilihat dulu apakah objeknya masuk ke ranah nahi mungkar atau ke ranah amar ma'ruf harus bisa dibedakan, apabila masuk ke ranah nahi mungkar terus masyarakat setempat tidak ada keberanian untuk menegur atau memberantasnya tapi masyarakat mendukung untuk memberantasnya maka FPI masuk ikut andil untuk memotivasi agar bersama-sama dengan masyarakat setempat untuk memberantas kemaksiatan.

Razia dilakukan sebagai bentuk respon terhadap keluhan masyarakat tentang adanya tempat pemaksiatan yang ada di lingkungannya baik lisan maupun tertulis. Setelah adanya pengaduan tersebut, FPI akan melakukan survey dan investigasi oleh Badan Investigasi Front (BIF) kemudian FPI melakukan tindakan dengan cara dakwah kemudian surat peringatan dengan memberikan tembusan kepada Kepolisian, Dandim dan Satpo PP selanjutnya langkah terakhir melakukan eksekusi. Banyak kalangan masyarakat yang datang dan menyampaikan keluhan adanya aktivitas yang meresahkan warga ke FPI, karena keluhan/pengaduan dari masyarakat yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah tidak di tanggapi dan juga berbelit-belit dalam prosedur sehingga surat pengaduan dari masyarakat sering mengendap tanpa ada solusi atau langkah nyata dari pemerintah daerah.

Selain kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas, FPI melalui sayap organisasinya FMI (Front Mahasiswa Islam) juga melaksanakan kegiatan lain, seperti seminar bagi pelajar dan mahasiswa. Namun kegiatan tersebut belum berlangsung secara kontinu, yakni masih sesuai kebutuhan, seminar ini di gagas oleh mahasiswa yang tergabung dalam Front

Mahasiswa Islam yang merupakan sayap dari FPI, substansi dari seminar ini adalah *problem solving*, pembenahan mental dan moral, dan nilai-nilai kebangsaan.

Terkait relevansi antara program yang dijalankan dengan proses penumbuhkembangan nilai-nilai kebangsaan dijelaskan oleh DSn bahwa aktivitas yang dilakukan FPI sangat relevan dengan upaya penumbuhkembangan nilai-nilai kebangsaan. Misalnya melalui kegiatan halaqoh dan hisbah, dimana dalam kegiatan halaqoh masyarakat diberikan pemahaman mengenai agama yang baik dan benar karena pada dasarnya Islam mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang sudah barang tentu relevan dengan nilai-nilai kebangsaan. Relevansi kegiatan hisbah dengan nilai kebangsaan dijelaskan DSn adalah tindakan ini beriringan dengan upaya pemerintah dalam rangka pendidikan karakter bangsa.

FPI menanamkan bahwa kita mempunyai kultur yang berbeda artinya maka kita berpijak dalam bingkai NKRI dari pusat hingga ke daerah. Dijelaskan oleh DSs bahwa NKRI adalah harga mati bagi FPI, siapapun yang merongrong, menghina dan merusak NKRI maka FPI akan istiqomah menjadi yang terdepan dalam menghadapi ancaman terhadap NKRI. Penanaman nilai-nilai kebangsaan salah satunya dilakukan FPI melalui himbauan yang mewajibkan seluruh anggota FPI untuk ikut Pemilu atau mensukseskan Pemilu. Selain itu, sebagaimana dijelaskan DS, FPI melaksanakan pengkaderan atau Diklat terpadu bagi seluruh pengurus dan anggota sehingga sumber daya manusia pada FPI menjadi meningkat baik secara pengetahuan umum maupun juga dalam pengetahuan tentang agama yang akhirnya akan terbentuk sumber daya manusia yang handal, mumpuni sekaligus beriman. Senada dengan ASS yang mengatakan bahwa dalam prosesnya, kegiatan diklat ini berisi tentang pengenalan kecintaan terhadap tanah air yang biasanya dilaksanakan melalui kerjasama dengan TNI .

Pembangunan nilai-nilai kebangsaan membutuhkan suatu komitmen dalam diri setiap elemen masyarakat. Sekaitan dengan itu, DSn menjelaskan pentingnya mengintervensi diri sendiri dan orang lain bahwa NKRI harga mati sebagai suatu komitmen bersama. Penegakkan aturan hukum harus dilakukan, utamanya berdasar pada aturan yang tertera dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Komitmen FPI ditunjukkan dengan tidak pandang bulu dalam menegakkan kebenaran. Dijelaskan DSn bahwa

sekalipun seorang Imam besar FPI, jika melenceng dari syariat agama wajib mengundurkan diri atau di berhentikan. FPI berkomitmen bahwa yang salah tetap salah dan harus menerima komitmennya. FPI senantiasa berusaha melaksanakan program-program pemerintah selama tidak bersebrangan dengan aturan syariat agama.

Terkait dengan upaya pembangunan bangsa, FPI berkomitmen untuk senantiasa membangun karakter bangsa yang berdasar atas aturan-aturan agama. Hal itu dijelaskan DS bahwa FPI mempunyai komitmen untuk bersatu dalam membangun moral bangsa, karena dekadensi moral merupakan masalah krusial yang terjadi dewasa ini. Pandangan DS terkait bobroknya moral gerenari bangsa merupakan segala jenis penyakit masyarakat yang akan menggerogoti dan merusak generasi bnagsa, baik disadari maupun tidak disadari.

Senada dengan IH yang menjelaskan bahwa dalam membangun moral generasi bangsa, FPI melaksanakan pemantauan dan pengawalan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelarangan Miras, Koordinasi dengan Kepolisian, Kodim dan satpol PP dengan cara pemasangan striker, menyebarkan brosur-brosur yang berisi ajakan untuk bersama-sama memberantas miras karena kita tahu bahwa miras itu akan merusak moral bagi generasi muda. Selain itu, dijelaskan IH bahwa upaya yang dilakukan dalam membangun moral bangsa adalah melalui program dakwah yang bertujuan menegakkan amar ma'ruf yaitu mengajak kebaikan atau perbuatan baik.

Substansi materi yang dinilai relevan dengan pembangunan nilai-nilai kebangsaan secara singkat dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan kebanggaan sebagai bangsa indonesia, yakni dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap aktivitas dan atau cara berkomunikasi sehari-hari. Hal itu menunjukkan FPI sadar bahwa FPI merupakan masyarakat biasa yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia.
- 2) Menunjukkan kebanggaan bertanah air indonesia, yakni dengan menggelorakan bahwa NKRI adalah harga mati bagi FPI. Hal itu merupakan perwujudan kebanggaan FPI dalam bertanah air indonesia.
- 3) Mengajarkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang dapat merugikan bangsa

dan negaranya, yakni melalui Hisbah dimana FPI berkoordinasi dengan aparat Kepolisian, Dandim dan juga Satpol PP sehingga apa yang dilakukan FPI hanyalah berdakwah untuk mengajak umat dalam hal mencegah kemungkaran dan menegakkan kebenaran.

- 4) Mengajarkan nilai kesetiaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Mengajarkan perilaku yang harus ditampilkan yang mencerminkan jiwa dan kepribadian indonesia

### **Hambatan yang ditemui Ormas Islam FPI dalam Membangun Nilai-Nilai Kebangsaan**

Pembangunan nilai-nilai kebangsaan yang dilaksanakan oleh Ormas Islam FPI di Kabupaten Purwakarta mempunyai beberapa hambatan, dalam arti bahwa efektivitas pelaksanaan program penumbuhkembangan nilai-nilai kebangsaan mempunyai sejumlah masalah yang perlu dibenahi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah pengurus Ormas Islam FPI ditemukan beberapa hambatan yang dihadapi FPI dalam membangun nilai-nilai kebangsaan.

Terkait dengan hal tersebut, DSn menjelaskan bahwa hambatan yang selama ini ditemui Ormas Islam FPI dalam membangun nilai-nilai kebangsaan adalah adanya pelabelan Ormas Islam FPI sebagai Ormas yang anarkis dan radikal yang secara psikologis dan moralitas dapat menghambat kinerja Ormas Islam FPI dalam melaksanakan upaya pembangunan nilai-nilai kebangsaan. Hal tersebut dijelaskan DSn terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat itu mengenai gerakan-gerakan FPI yang hanya dinilai sebagai Ormas penegak agama saja, tanpa ada relevansi yang jelas dengan pembangunan masyarakat.

Pendapat DSn senada dengan ASS yang menjelaskan bahwa salah satu hambatan yang muncul dalam pergerakan FPI adalah citra negatif di masyarakat yang sedikit banyak dipengaruhi pemberitaan media yang memberikan gambaran gerakan FPI yang mencitrakan negatif, sehingga ketika FPI turun ke lapangan sulit berbaur dengan masyarakat. Maraknya pemberitaan negatif oleh media menjadikan masyarakat menjadi antipati terhadap FPI, karena itu dijelaskan ASS

pihaknya melakukan pendekatan secara persuasif yang lambat laun dapat membuat masyarakat menerima keberadaan FPI sebagai ormas yang menegakkan kebenaran.

Lain halnya dengan IH yang menjelaskan hambatan yang muncul lebih kepada pelaksanaan program, yakni adanya oknum pejabat dan oknum aparat yang membekingi tempat-tempat maksiat yang menjadi objek *sweeping* sehingga FPI sering berbenturan dengan orang-orang yang dibekingi oleh oknum tersebut. Hal lain yang menyebabkan itu terjadi, dijelaskan oleh DS bahwa adanya perbedaan persepsi dan pemahaman tentang arti pentingnya nilai-nilai kebangsaan yang diakibatkan adanya perbedaan latar belakang, baik pendidikan maupun status sosial lainnya. Selain itu, dijelaskan DS bahwa belum terbangunnya hubungan harmonis antara Ormas dan Muspida menjadi hambatan lain yang muncul yang dapat menghambat program-program yang dilaksanakan FPI.

Selanjutnya hambatan lain yang muncul adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia organisasi dalam rangka efektivitas kinerja Ormas Islam dijelaskan ASS terbagi menjadi dua, yakni hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yang muncul adalah adanya miskin figur di lingkup masyarakat Kabupaten Purwakarta, karena tokoh-tokoh tua cenderung tidak berperan aktif (hanya dibelakang layar). Hambatan eksternal yang dihadapi adalah terbatasnya dana dalam melaksanakan kegiatan, sekalipun dana bukan menjadi hal utama akan tetapi dijelaskan ASS bahwa segala aktivitas tidak dapat berjalan tanpa adanya dana.

Lain halnya dengan DS yang menjelaskan bahwa secara internal masalah yang muncul adalah adanya perbedaan persepsi antar pengurus dan anggota yang berdampak pada sulitnya penyatuan visi dan misi ormas. Selain itu, DS menjelaskan pengkaderan dan diklat belum dapat dilaksanakan secara terpadu dan bertahap dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai. Diklat dan pengkaderan merupakan hal penting yang harus dilakukan mengingat sebagaimana dijelaskan DSn karena FPI bukan organisasi profesional yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat dengan kultur sosial dan latar belakang pekerjaan yang berbeda, misalnya wiraswasta, ustadz, pegawai swasta, pedagang dan lain sebagainya.

Masalah tersebut mempunyai kaitan dengan komitmen anggota untuk melakukan berbagai aktivitas di FPI. Berdasarkan penuturan DSn diketahui bahwa hambatan yang ditemui dalam membangun komitmen anggota untuk bersama-sama melakukan upaya penumbuhkembangan nilai-nilai kebangsaan adalah perbedaan kemampuan berpikir antar anggota. Senada dengan DSn, DS juga menjelaskan bahwa salah satu hambatan yang ditemui adalah terbatasnya pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan yang dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang masih berkualitas rendah.

Selain itu, masalah yang muncul berkaitan dengan membangun komitmen anggota adalah dari aspek finansial. Sebagaimana dijelaskan IH bahwa pembiayaan FPI berasal dari swadaya anggota dan sumbangan donator yang sudah barang tentu terbatas dari segi jumlah. Hal itu dijelaskan IH dapat mengganggu pelaksanaan program kerja yang direncanakan, karena menurutnya segala aktivitas tidak dapat terlepas dari dana, sekalipun dana bukan merupakan hal yang utama.

Selanjutnya hambatan yang muncul dalam menanamkan pentingnya hidup bersama dalam menghadapi tantangan masa kini, dikemukakan DS bahwa kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat ditambah dengan kuatnya arus globalisasi dan westernisasi dapat menggerus nilai-nilai kebangsaan. Hal tersebut menjadikan memudarnya kepekaan masyarakat tentang pentingnya hidup bersama.

Senada dengan DS, ASS juga menjelaskan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai kebersamaan ditumbuhkembangkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan masalah yang timbul dan menjadi pekerjaan rumah bagi FPI. Untuk membumikan pentingnya hidup bersama sebagai sebuah masyarakat, FPI melaksanakan pendidikan secara terus-menerus terkait dengan pola hidup, pola pemikiran dan budaya di masyarakat melalui cara dakwah oleh LDF (Lembaga Dakwah Front).

Masalah lain yang sering muncul dijelaskan oleh IH adalah sering terjadi mis komunikasi dengan masyarakat yang disebabkan oleh pemberitaan sisi negatif FPI oleh media sehingga membuat masyarakat berfikir bahwa FPI identik dengan anarkisme, radikalisasi dan arogan. Karena itu, FPI rutin mengadakan pengajian-pengajian yang tidak



jarang juga diikuti oleh masyarakat yang bukan anggota FPI, karena FPI juga melibatkan tokoh-tokoh agama yang notabene juga menjadi tokoh masyarakat sehingga masyarakat lebih tahu FPI bukan hanya dari luarnya saja tapi masyarakat juga di ajak untuk lebih mengenal FPI dari dalamnya karena FPI juga berasal dari masyarakat yang dibungkus oleh pakaian organisasi yaitu organisasi masyarakat FPI.

Terkait dengan program pembentukan individu yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan FPI melaksanakan beberapa upaya, sebagaimana dijelaskan DS bahwa banyak cara agar program dapat berjalan dengan efektif yaitu dengan memprioritaskan program, implementasi program, evaluasi program secara rutin serta penanganan program bermasalah secara cepat.

Berbeda halnya dengan ASS yang menjelaskan bahwa program FPI bukan hanya turun ke lapangan saja, tetapi juga melalui pengkaderan internal anggota seperti melalui program-program mingguan (*halaqoh* dan *tarbiyah*) yang dilaksanakan oleh setiap DPC dengan tema yang berbeda-beda. Selain itu, dilaksanakan pula kegiatan-kegiatan kemahasiswaan seperti diskusi mingguan dan bulanan yang dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswa lain dan juga ormas-ormas lainnya.

### **Upaya yang Dilakukan Ormas Islam FPI untuk Mengatasi Hambatan Yang Muncul dalam Membangun Nilai-Nilai Kebangsaan**

Pembangunan nilai-nilai kebangsaan yang dilaksanakan FPI sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak dapat terlepas dari hambatan yang mendera, karena itu berbagai upaya senantiasa dilakukan oleh para pengurus dan anggota FPI. Dijelaskan oleh DSn bahwa FPI sebagai organisasi masyarakat sipil sekalipun mempunyai misi membangun negara dan masyarakat, akan tetapi dalam pelaksanaannya FPI seringkali bersinergi dengan aparat kepolisian dan Satpol PP terutama dalam melakukan razia dan sweaping ke tempat-tempat yang dinilai meresahkan masyarakat. Selain itu, dijelaskan DSn bahwa selain bersinergi dengan kepolisian dan satpol PP, FPI juga senantiasa membangun kerjasama dengan masyarakat, baik dengan tokoh masyarakat, tokoh agama maupun masyarakat biasa.

Senada dengan ASS yang menjelaskan bahwa dalam mengatasi hambatan yang muncul berkenaan dengan pembangunan nilai-nilai kebangsaan FPI menggalakkan sosialisasi aktif kepada masyarakat melalui dakwah dari tokoh-tokoh FPI baik melalui pengajian umum (mimbar) maupun pengajian-pengajian rutin pada skala yang lebih kecil.

FPI yakin bahwa jalan "*musyawarah*" merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan, karena itu diperlukan suatu sinergitas antar komponen bangsa. Pentingnya musyawarah sebagai jalan yang diambil pada saat menemui hambatan dijelaskan oleh DS bahwa hal yang sering dilakukan FPI adalah dengan bermusyawarah pada saat menemui hambatan baik pada waktu di lapangan maupun di internal ormas sendiri dengan tidak mengenyampingkan komitmen yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Pernyataan DS senada dengan IH yang mengemukakan bahwa beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan aparat kepolisian secara intensif, serta dengan tokoh masyarakat melalui musyawarah dan silaturahmi serta dakwah.

Selanjutnya terkait dengan pembangunan sumber daya organisasi, FPI melaksanakan beberapa upaya. Sebagaimana dijelaskan DSn bahwa hambatan yang dihadapi FPI adalah adanya perbedaan status sosial dari anggota serta tidak fokusnya anggota secara full kepada organisasi, karena kesibukan yang berbeda. Karena itu, FPI mengadakan kegiatan halaqoh setiap bulan dengan membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi organisasi, hal itu menurut DSn sebagai upaya evaluasi bagi organisasi yang dalam pelaksanaannya melalui pembimbingan oleh Ulama dan Ustadz di lingkungan masing-masing.

Senada dengan ASS yang mengatakan bahwa upaya yang dilakukan FPI dalam mengatasi hambatan terkait pengelolaan sumber daya alam yaitu; melalui sharing bulanan, syahriaan bulanan di lingkungan masing-masing bersama masyarakat dan dibimbing oleh ustadz setempat, rapat bulanan (Pengurus dan Anggota FPI), peninjauan dan evaluasi program yang telah dilaksanakan serta melalui pembahasan bersama dalam menemukan upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.

Halaqoh dianggap sebagai upaya strategis, utamanya dalam melakukan

*upgrading* pengurus dan anggota FPI. Hal tersebut dijelaskan oleh IH bahwa dengan cara *halaqoh tarbiyah* (pengajian mingguan), misal pekan pertama di isi dengan materi pengajian Al Qur'an, pekan kedua di isi dengan materi tafsir, pekan ketiga hadits dan pekan kelima di isi dengan kajian ilmiah tentang ekonomi islam. FPI juga membentuk karakter anggotanya dulu dengan pbenahan moral di internal anggotanya dengan mengadakan diklat-diklat kelaskaran yang pelaksanaannya diserahkan kepada qoid bersama dengan masyarakat.

Berkaitan dengan pembangunan komitmen anggota dalam membangun nilai kebangsaan, ditegaskan DSn bahwa setiap pengurus dan anggota harus senantiasa mengacu dan mendasarkan segala aktivitasnya pada aturan yang tertera pada AD/ART. Selain itu, DSn selaku Ketua Tanfidzi FPI DPW Purwakarta menghimbau dan mensosialisasikan secara bertahap mengenai pentingnya anggota dan pengurus FPI dalma melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pemerintahan. Pemberlakuan sanksi dimungkinkan apabila ada pengurus dan atau anggota yang melanggar peraturan, baik yang tertuang dalam AD/ART maupun aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sanksi yang diterapkan diberikan secara bertahap, dimulai dari etguran, pemanggilan sampai pemberhentian sebagaia anggota FPI.

Hal tersebut senada dengan IH yang menjelaskan bahwa untuk dapat menjadi anggota FPI, peserta harus menjalani tes dalam hal pemahaman tentang keagamaan, jika dinilai kurang maka peserta harus mengikuti halaqoh untuk meningkatkan pemahaman anggota mengenai agama. Selain itu, FPI menerapkan sanksi bagi anggotanya yang melanggar aturan atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh FPI mulai dari teguran, peringatan, dikeluarkan dari keanggotaan FPI bahkan sampai dipidanakan apabila melanggar peraturan perundang-undangan nasional, Upaya pemberian sanksi bagi anggota FPI tersebut, dijelaskan IH karena FPI yang konsen terhadap pembangunan moral masyarakat tidak akan berhasil apabila anggota FPI sendiri melanggar moral. Selain itu, pemberian sanksi juga dilakukan sebagai upaya penanaman nilai kedisiplinan pada anggota sebagai nilai inti yang harus ditumbuhkembangkan.

Selain membangun kecerdasan moral para anggota, FPI juga leakukan uppaya-upaya

bagi penguatan kebersamaan masyarakat. Hal tersebut dijelaskan DSn bahwa FPI lebih cenderung menyadarkan masyarakat agar peduli terhadap masyarakat dan permasalahan bangsa. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi "*Barang siapa yang tidak pernah peduli dengan urusan orang muslim maka mereka tidak termasuk golongan kami.*" Nabi telah memberikan eksekusi yang jelas artinya diantara kita harus peduli terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Senada dengan DS yang menjelaskan bahwa hal-hal yang dilakukan untuk memperkuat kebersamaan adalah dengan mensosialisasikan pentingnya saling membantu dengan sesama, peningkatan kepedulian sosial terhadap masyarakat serta proaktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Berbeda dengan ASS yang menjelaskan bahwa dalam membangun kebersamaan, FPI melakukan hal-hal yang sifatnya kerjasama seperti membangun kerja sama dengan TNI, Kepolisian, Satpol PP dan ormas Islam lainnya. Selain itu, FPI juga membaur dengan masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Hal itu, dijelaskan ASS sebagai suatu upaya untuk membangun kebersamaan melalui pemberian tanggung jawab secara bersama sebagai masyarakat dan bukan sebagai individu. ASS mencontohkan salah satu kegiatan FPI dalam kaitannya dengan pembangunan kebersamaan adalah menjalin kerjasama dengan perhutani, yakni dengan penanaman tanah-tanah perhutani yang kosong oleh masyarakat dimediasi oleh FPI. Hal itu dilakukan agar terjadi peningkatan perekonomian di masyarakat.

Lebih lanjut IH menjelaskan bahwa FPI mengadakan pengajian seperti takbir akbar bersama-sama masyarakat, membuka majelis ta'lim serta mengisi tempat-tempat pengajian. Hal itu menurut IH sesuai dengan visi dan misi FPI yang berorientasi pada penguatan nilai keagamaan atau aqidah umat islam. Selain itu, ditegaskan DS bahwa terwujudnya kebersamaan sosial berangkat dari adanya kesamaan persepsi dan pemahaman mengenai tujuan awal yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar.

Selain beberapa hal sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat satu paradigm yang berkembang dalam tubuh keorganisasian FPI, dimana FPI dianggap sebagai organisasi alternatif, dalam arti bahwa masyarakat atau pelaku kejahatan (pelanggar norma) lebih takut

terhadap FPI dibandingkan terhadap kepolisian. Karena itu, aparat kepolisian seringkali meminta bantuan kepada FPI utamanya terkait pelaksanaan razia tempat-tempat yang dinilai menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dijelaskan oleh DS<sub>n</sub> bahwa FPI menyadari bahwa masyarakat biasa yang secara hukum tidak mempunyai otoritas untuk merazia, maka FPI bersinergi dengan pihak-pihak terkait yang mempunyai otoritas tersebut dalam melakukan razia.

Selanjutnya dijelaskan DS<sub>n</sub> bahwa FPI dibentuk pada intinya untuk menjawab berbagai tantangan atau memberikan solusi untuk masing-masing wilayah yang sudah barang tentu memiliki permasalahan yang berbeda. FPI diharapkan menjadi *problem solving* bagi masyarakat setempat. Dalam melaksanakan aktivitasnya, FPI tidak secara radikal langsung melakukan penindakan secara paksa, tetapi melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Sebagaimana dijelaskan DS<sub>n</sub> bahwa FPI mengadakan teguran-teguran terlebih dahulu untuk FPI saat ini, tidak seperti FPI pada waktu dulu banyak di lapangan. Melakukan berbagai macam pendekatan apabila mereka beragama Islam maka pendekatannya dengan cara Islami, andaikata mereka non Islam dilakukan pendekatan dengan cara dialog artinya ada satu tanggung jawab untuk menciptakan kenyamanan, kedamaian secara wilayah atau secara prinsip mereka sendiri. Aksi terbaru yang dilakukan FPI adalah unjuk rasa menolak diselenggarakannya Miss World di Indonesia yang dilaksanakan secara nasional oleh FPI.

## **Pembahasan**

### **Pengetahuan Ormas Islam FPI tentang Nilai-Nilai Kebangsaan**

Ormas Islam FPI mempunyai tekad untuk membumikan nilai-nilai kebangsaan pada masyarakat Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pengetahuan Ormas Islam FPI tentang nilai-nilai kebangsaan dan terlihat dari kelahiran FPI yang mempunyai tujuan untuk membangkitkan cinta terhadap masyarakat, negara dan agama.

Dasar lahirnya FPI menjadi titik tolak pergerakan Ormas tersebut sebagai pelayan masyarakat (*khodimul ummah*), sebagai benteng terdepan untuk membela agama Islam (*nashirudin*), serta meluruskan moral yang

merupakan ruh agama dan suatu benteng untuk menciptakan kondisivitas keadaan masyarakat. Hal tersebut analog dengan fungsi Ormas sebagaimana tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yakni; meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan mewujudkan tujuan negara.

Relevansi antara dasar kelahiran FPI dengan pembangunan nilai-nilai kebangsaan terletak pada realitas yang menunjukkan tergerusnya nilai-nilai luhur bangsa semakin mendorong masyarakat Indonesia pada suatu arah yang menjauhi cita-cita kebangsaan. Sebagaimana dijelaskan Taufiq (2008:1) bahwa tergerusnya nilai-nilai luhur bangsa akan mendorong terjadinya implikasi yang parah secara sosial. Cidera sosial yang selama ini terjadi ditandai oleh munculnya pelbagai macam sikap sosial yang ingin menang sendiri (individualistis), munculnya ego pribadi dan kelompok yang menggadaikan semangat persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa, sikap main hakim sendiri, serta munculnya perasaan “saya yang paling benar” dan lain sebagainya. Karena itu, hal pangkal yang harus dikembangkan menurut pemaparan beberapa narasumber yang diwawancarai adalah pembangunan moral bangsa sebagai prasyarat menciptakan masyarakat madani yang adil makmur.

Para aktivis FPI memandang bahwa kecintaan terhadap tanah air merupakan aspek yang ditekankan dalam setiap aktivitasnya, dimana pentingnya nilai-nilai perjuangan untuk dikembangkan senada dengan hadits yang mengatakan “*hubbul wathon minal iman*” yang artinya sebagian daripada iman. Karena itu, membela tanah air, membela eksistensi tanah air, dan membela persatuan dan kesatuan bangsa merupakan amanat-amanat ilahiyah bukan hanya amanat konstitusional saja. Adanya kebanggaan sebagai sebuah bangsa, menjadikan FPI sebagai Ormas penegak

keadilan dengan agama Islam sebagai landas pijaknya.

Hal itu benar adanya, karena setelah ditelisik lebih jauh bahwa kebanggaan terhadap bangsa akan berpengaruh terhadap nilai-nilai kebangsaan sehingga meniscayakan lahirnya harga diri sebagai bagian dari nasionalisme akan dapat memperkokoh watak dan karakter bangsa, utamanya dalam mempertahankan kemerdekaan dan menghadapi berbagai macam pembrontakan dan gangguan keamanan lainnya. Modal kebangsaan (nasionalisme) yang kuat amat diharapkan tumbuh dan berkembang dalam setiap insan bangsa dalam menghadapi tantangan global dengan berbagai macam nilai yang dibawanya sebagai prasyarat terbangunnya suatu masyarakat madani dipandang oleh aktivis FPI sebagai wujud kecintaan umat muslim terhadap Tuhan-Nya. Karena itu, FPI amat konsen dalam mengembangkan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar berkembangnya nilai-nilai kebangsaan yang dilandasi ketulusan dan keikhlasan yang lahir sebagai manifestasi kecintaan terhadap Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan Hastuti (2011:12) bahwa bangsa merupakan sikap yang dilandasi ketulusan dan keikhlasan yang diwujudkan dalam perbuatan untuk kejayaan tanah air dan kebahagiaan bangsanya.

Pengetahuan aktivis FPI ikhwal kecintaan terhadap negara senantiasa berpedoman pada Al Qur'an dan Al-Hadist yang salah satu ajarannya menempatkan agama sebagai pokok daripada segala yang pokok. Senada dengan sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mengandung arti bahwa hal ikhwal yang kita laksanakan dalam keseharian kehidupan harus didasari oleh keyakinan terhadap agama yang dianut serta merupakan pengejawantahan nilai-nilai religiusitas dalam aktivitas sehari-hari.

Nilai agama sebagai nilai dasar yang harus dimiliki, diinternalisasikan dan dikembangkan dalam diri warga negara merupakan inti pembangunan jatidiri dan wawasan kebangsaan sebagai negara religi. Adalah salah jikan nilai kebangsaan mengalahkan nilai kecintaan terhadap Tuhan sebagai pemilik seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Karena itu, Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa sebagaimana telah dijelaskan di atas menempatkan "Ketuhanan" sebagai sila pertama yang menjiwai sila-sila lainnya karena Pancasila bersistem hierarkis piramidal.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka jelas bahwa karakteristik yang harus dimiliki warganegara sebagai implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari adalah karakter agamis, yakni suatu masyarakat yang secara benar melaksanakan patokan agamanya masing-masing. Pentingnya pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan mencerminkan identitas dari suatu masyarakat, yakni sejauhmana mereka mengenal kepada dirinya sendiri, mengenal kepada tanah airnya dan mengenal kepada budayanya. Hal tersebut saat ini telah mengalami degradasi yang ditunjukkan oleh menurunnya kualitas nasionalisme dari masyarakat. Menurunnya nilai toleransi, moderasi, penghargaan akan adanya pluralitas, serta nilai filosofis lain menjadikan pentingnya dilakukan suatu upaya untuk memberikan pencerahan sosial kepada masyarakat ikhwal pembangunan nilai-nilai kebangsaan. Sebagaimana dijelaskan Lestyarini (2012:352) bahwa pemahaman terhadap landasan filosofis dan historis pembangunan bangsa menjadi dasar dalam bagi terciptanya semangat kebangsaan yang kuat. Disamping itu, nilai-nilai lokalitas, wawasan nasional, dan pemahaman terhadap berbagai fenomena di era global merupakan wujud dari upaya komprehensif memahami diri sebagai bangsa dan semangat kebangsaan dalam diri.

### **Strategi Pengembangan Nilai Kebangsaan yang Dilakukan Ormas Islam FPI**

Penanaman nilai-nilai kebangsaan memerlukan strategi tepat dalam pelaksanaannya sehingga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan baik melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi peneliti menemukan hal-hal yang dilakukan Ormas Islam FPI dalam kaitannya dengan penumbuhkembangan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat. Hal utama yang menjadi fokus tujuan setiap gerakan yang dilakukan FPI adalah menegakkan "*amar mar'uf nahyi munkar*", terlebih ketika degradasi moral setia menghiasi pemberitaan diberbagai media dewasa ini. Misalnya, kaburnya pedoman moral yang ditunjukkan oleh perilaku menyimpang dari aturan agama dan aturan pemerintah serta meningkatnya perilaku merusak diri yang ditampilkan oleh terjangkitnya berbagai penyakit masyarakat seperti meminum

minuman keras, perjudian, tindakan asusila dan lain sebagainya. Jika permasalahan tersebut tidak segera diatasi, diasumsikan akan terjadi kehancuran nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana dijelaskan Lickona (1992:14) bahwa terdapat 10 tanda perilaku manusia yang menunjukkan ke arah kehancuran suatu bangsa, yaitu; meningkatnya kekerasan, ketidakjujuran yang membudaya, semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru dan figur pemimpin, pengaruh *peer group* terhadap tindakan kekerasan, meningkatnya kecurigaan dan kebencian, penggunaan bahasa yang memburuk, penurunan etos kerja, menurunnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, meningkatnya perilaku merusak diri, serta semakin kaburnya pedoman moral.

Program-program yang dilaksanakan FPI saat ini lebih kepada gerakan sosial dan kemasyarakatan, yakni pemberian nasehat dan pencerdasan mengenai ajaran Islam dan pentingnya menegakkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan. Salah satu yang diajarkan adalah "*targib wa tarhib*" artinya ada motivasi untuk senantiasa cinta kepada sesama, negara dan agama.

Substansi materi yang dinilai relevan dengan pembangunan nilai-nilai kebangsaan nampak pada tujuan yang ingin dicapai FPI dalam setiap aktivitasnya. *Pertama*, menunjukkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, yakni dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap aktivitas dan atau cara berkomunikasi sehari-hari. *Kedua*, menunjukkan kebanggaan bertanah air Indonesia, yakni dengan menggelorakan bahwa NKRI adalah harga mati bagi FPI. *Ketiga*, mengajarkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang dapat merugikan bangsa dan negaranya, yakni melalui Hisbah dimana FPI berkoordinasi

dengan aparat Kepolisian, Dandim dan juga Satpol PP sehingga apa yang dilakukan FPI hanyalah berdakwah untuk mengajak umat dalam hal mencegah kemungkaran dan menegakkan kebenaran. *Keempat*, mengajarkan nilai kesetiaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kelima*, mengajarkan perilaku yang harus ditampilkan yang mencerminkan jiwa dan kepribadian Indonesia.

Rasa cinta terhadap tanah air muncul dan berkembang menjadi sebuah paham (isme) menjadi nasionalisme yang dijadikan sebagai landasan hidup bernegara, bermasyarakat dan berbudaya dipengaruhi oleh kondisi historis dan dinamika sosio kultural yang ada di masing-masing negara. Hastuti (2011: 12) menjelaskan bahwa berarti cinta pada negeri tempat kita memperoleh penghidupan semenjak lahir sampai akhir hayat. Seseorang yang senantiasa berusaha agar negerinya tetap aman, sentosa dan sejahtera. Hal itu ditunjukkan FPI melalui aktivitas kegiatan "*hisbah*".

Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan nilai-nilai kebangsaan, diperlukan komitmen bersama antar elemen yang ada di FPI, masyarakat dan pemerintah secara sinergis. Karena itu, penting adanya dilakukan intervensi terhadap diri prabadi bahwa NKRI harga mati serta menjadi nilai dan komitmen yang harus terpatri dalam sanubari warga negara. Program Ormas Islam FPI mempunyai keselarasan antara misi yang dibangun dengan Pancasila dan UUD 1945 dengan wawasan kebangsaan karena mayoritas penduduk di Indonesia itu beragama Islam mereka pun tetap berlandaskan Pancasila, walaupun dalam perjuangannya semi radikal. Secara skematik program pembangunan nilai-nilai kebangsaan yang dilaksanakan FPI dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Pembangunan Nilai-Nilai Kebangsaan oleh FPI Purwakarta  
(Sumber : Data diolah Penulis, 2014)

Relevansi antara program kerja FPI dengan pembangunan nilai-nilai kebangsaan dan terletak pada landasan yang dijadikan acuan Ormas Islam FPI adalah Pancasila, UUD 1945 dan UU Ormas Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Senada dengan Nugaraha, dkk (2011: 121) yang meneliti tentang “kajian hukum peran dan tanggungjawab organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat” yang menghasilkan temuan bahwa ormas secara kelembagaan diharapkan masyarakat dapat mengaktualisasi diri dan berperan serta secara aktif dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.

### **Hambatan yang Ditemui Ormas Islam FPI dalam Membangun Nilai-Nilai Kebangsaan**

Hambatan merupakan suatu keniscayaan yang akan muncul seiring dengan pelaksanaan program yang direncanakan, karena maha merencanakan (manusia) tidak sama dengan maha menentukan (Allah SWT). Hal itupun terjadi pula dalam tubuh FPI dimana pelaksanaan program pembangunan nilai-nilai kebangsaan tidak selamanya berjalan mulus tanpa cela. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa hambatan yang muncul dalam upaya pembangunan nilai-nilai kebangsaan oleh FPI. *Pertama*, adanya pelabelan Ormas Islam FPI sebagai Ormas yang anarkis dan radikal yang secara psikologis dapat mengganggu konsentrasi dan kinerja FPI dalam melaksanakan upaya pembangunan bangsa. Sebagaimana dijelaskan Sari (2003:14) bahwa dalam konteks komunikasi, perkembangan suatu organisasi yang bergerak dalam kegiatan ORMAS banyak ditentukan oleh baik-buruknya opini publik atau citra publik terhadap ORMAS tersebut. Stigma negatif yang melekat pada tubuh FPI merupakan implikasi dari banyaknya pemberitaan miring mengenai FPI, hal tersebut senada dengan temuan Ninin & Listya (2003: 57) Kekerasan dan cara-cara drastis yang sering dilakukan FPI dalam penegakkan syariat Islam telah menimbulkan ketakutan pada diri banyak

orang yang secara tegas dapat mengganggu stabilitas suatu negara.

*Kedua*, minimnya pemahaman masyarakat mengenai gerakan-gerakan FPI yang hanya menilai FPI sebagai Ormas penegak agama saja, tanpa ada relevansi yang jelas dengan pembangunan masyarakat. *Ketiga*, pemberitaan media yang cenderung mendiskreditkan posisi FPI sebagai Ormas pembangunan bangsa. Maraknya pemberitaan negatif oleh media menjadikan masyarakat menjadi antipati terhadap FPI. *Keempat*, keberadaan oknum pejabat dan oknum aparat yang berdiri di belakang tempat-tempat maksiat yang menjadi objek *sweeping*, sehingga FPI sering berbenturan dengan orang-orang pemerintahan. *Kelima*, secara internal, adanya perbedaan persepsi dan pemahaman tentang arti pentingnya nilai-nilai kebangsaan yang diakibatkan adanya perbedaan latar belakang, baik pendidikan maupun status sosial lainnya menjadikan sulitnya menyamakan persepsi mengenai arah aktivitas dan orientasi yang hendak dicapai. *Teamwork* menjadi hal penting dalam membangun *team building* dalam organisasi sekalipun dalam praktiknya seringkali ditemukan beberapa hambatan.

*Keenam*, pengelolaan sumber daya manusia organisasi terhambat oleh miskinnya figur pemimpin di lingkup masyarakat Kabupaten Purwakarta, karena tokoh-tokoh tua cenderung tidak berperan aktif (hanya dibelakang layar). *Ketujuh*, terbatasnya dana dalam melaksanakan kegiatan. *Kedelapan*, belum terpadunya sistem pengkaderan dan diklat yang dilaksanakan secara bertahap dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai. *Kesembilan*, adanya perbedaan tingkat kemampuan berpikir antar anggota.

*Kesepuluh*, terbatasnya pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan, *Kesebelas*, terpaan globalisasi dan westernisasi menimbulkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Budimansyah (2010) dalam penelitiannya tentang “tantangan globalisasi terhadap pembinaan wawasan kebangsaan di sekolah” yang menghasilkan temuan bahwa globalisasi menantang kekuatan penerapan unsur jati diri bangsa Indonesia melalui media massa. Para penyimak televisi lebih tertarik dengan budaya baru yang ditawarkan agen budaya luar sekolah dibandingkan dengan budaya sendiri yang ditanamkan di lembaga pendidikan. Selain itu, adanya pertentangan antara nilai-nilai yang

bersumber dari budaya adiluhung bangsa Indonesia dengan nilai-nilai yang dibawa oleh agen globalisasi dapat mengakibatkan terjadinya konflik nilai pada diri setiap individu.

*Kedua*, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai kebersamaan ditumbuhkembangkan dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, sering terjadinya mis komunikasi dengan masyarakat yang disebabkan oleh pemberitaan sisi negatif FPI oleh media sehingga membuat masyarakat berfikir bahwa FPI identik dengan anarkisme, radikalisme dan arogan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya media dalam mengekspose nilai-nilai kebangsaan dan , yang justru cenderung menampilkan tayangan-tayangan yang menyimpang dari wawasan kebangsaan. Senada dengan Budimansyah (2010) yang menunjukkan bahwa tayangan televisi nasional sangat miskin nuansa pengembangan wawasan kebangsaan. Karena itu, perlu dibuat tayangan tandingan yang sama menariknya tetapi sarat akan nilai-nilai kebangsaan. *Setting* tersebut diperlukan guna mengimbangi adanya penetrasi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya bangsa yang dibawakan oleh tayangan televisi asing maupun nasional.

### **Upaya yang Dilakukan Ormas Islam FPI untuk Mengatasi Hambatan yang Muncul dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Kebangsaan**

Beberapa upaya yang dilakukan Ormas Islam FPI untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam membangun nilai-nilai kebangsaan. *Pertama*, membangun sinergitas dengan aparat kepolisian, Satpol PP dan masyarakat terutama dalam melakukan razia dan *sweeping* ke tempat-tempat yang dinilai meresahkan masyarakat. Sejalan dengan Bernard dalam Sutarto (1992:21) yang menyatakan bahwa organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

*Kedua*, menggalakkan sosialisasi aktif kepada masyarakat melalui dakwah dari tokoh-tokoh FPI baik melalui pengajian umum (mimbar) maupun pengajian-pengajian rutin pada skala yang lebih kecil. Senada dengan fungsi ormas sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, meliputi; (1) penyalur kegiatan sesuai dengan

kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi, (2) pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, (3) penyalur aspirasi masyarakat, (4) pemberdayaan masyarakat, (5) pemenuhan pelayanan sosial, (6) partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau (7) pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

*Ketiga*, menekankan pentingnya musyawarah kepada masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungannya, sehingga ketika ada masalah tidak langsung menyulut emosi, melainkan dikaji dulu secara rasional. Hal ini merupakan perwujudan sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan”, dimana FPI senantiasa menumbuhkembangkan pemaknaan terhadap sila keempat tersebut dalam perilaku keseharian, khususnya bagi anggota dan masyarakat pada umumnya. *Keempat*, memperkuat komitmen anggota dan pengurus FPI untuk senantiasa konsisten dalam melaksanakan aktivitas atau program kerja, terutama dalam rangka membangun nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, FPI melakukan berbagai upaya yaitu; menggalakkan sharing bulanan, syahriaan bulanan di lingkungan masing-masing bersama masyarakat dan dibimbing oleh ustadz setempat, rapat evaluasi, peninjauan dan evaluasi program yang telah dilaksanakan serta melalui pembahasan bersama dalam menemukan upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Selain itu, FPI juga membentuk karakter anggotanya dulu dengan pembenahan moral di internal anggotanya dengan mengadakan diklat-diklat kelaskaran yang pelaksanaannya diserahkan kepada qoid bersama dengan masyarakat.

Selanjutnya dilakukan sosialisasi dan pelebagaan nilai-nilai keorganisasian sebagaimana tercermin dalam AD/ART DPW FPI Kabupaten Purwakarta sebagai kerangka acuan dalam bertindak dan bekerja dengan dan atas nama organisasi dengan ketentuan, jika ada anggota yang melanggar aturan organisasi, maka pemberlakuan sanksi dimungkinkan yang pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap, mulai dari teguran, pemanggilan sampai pemberhentian sebagai anggota FPI, bahkan

sampai dipidanakan apabila melanggar peraturan perundang-undangan nasional. Upaya pemberian sanksi dilakukan karena FPI yang konsen terhadap pembangunan moral masyarakat tidak akan berhasil apabila anggota FPI sendiri melanggar moral. Selain itu, pemberian sanksi juga dilakukan sebagai upaya penanaman nilai kedisiplinan pada anggota sebagai nilai inti yang harus ditumbuhkembangkan.

Keberhasilan pembangunan nilai-nilai kebangsaan membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya, karena itu FPI senantiasa menggalakkan kegiatan penyadaran bagi masyarakat terkait kepedulian terhadap permasalahan bangsa, mensosialisasikan pentingnya saling membantu dengan sesama, peningkatan kepedulian sosial terhadap masyarakat serta proaktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Selain itu, kebersamaan antar masyarakat juga dibangun melalui pemberian tanggung jawab secara kolektif sebagai masyarakat dan bukan sebagai individu, tablig akbar bersama-sama masyarakat, pembukaan majelis ta'lim serta mengisi tempat-tempat pengajian seiring dengan visi dan misi FPI yang berorientasi pada penguatan nilai keagamaan atau aqidah umat Islam. Untuk mempertegas hal tersebut di atas, berikut peneliti sajikan triangulasi berdasarkan tipe sumber data.

## SIMPULAN

### 1. Simpulan Umum

Pengembangan nilai-nilai kebangsaan dalam pelaksanaannya harus melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Urgensi pembangunan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari dilakukan untuk memantapkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta menjamin keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera, damai dan sentosa menuju masyarakat madani. Organisasi masyarakat mempunyai posisi strategis dalam pembangunan nilai kebangsaan dalam masyarakat, hal tersebut karena melalui Ormas masyarakat dapat lebih bebas untuk berekspresi dan mengaktualisasikan diri untuk berkontribusi lebih jauh dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkarakter kuat, cerdas moral, dan baik dalam berperilaku. Ormas Islam FPI sebagai bagian dari

masyarakat Indonesia turut berperan serta dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat karena berpandangan bahwa cinta terhadap bangsa dan negara merupakan bentuk perwujudan dari kecintaan terhadap Allah SWT.

### 2. Simpulan Khusus

- a. Para aktivis FPI memandang bahwa kecintaan terhadap tanah air merupakan prasyarat terbangunnya suatu masyarakat madani yang merupakan wujud dari kecintaan terhadap Allah SWT. Membela eksistensi tanah air serta persatuan dan kesatuan bangsa dipandang sebagai amanat ilahiyah, bukan hanya sebatas amanat konstitusional. Nilai agama sebagai nilai dasar yang harus dimiliki, diinternalisasikan dan dikembangkan dalam diri warga negara merupakan inti pembangunan jatidiri dan wawasan kebangsaan sebagai negara beragama yang menempatkan nilai "Ketuhanan" sebagai pangkal dari keseluruhan nilai yang ada.
- b. Strategi yang dilakukan FPI dalam mengembangkan nilai-nilai kebangsaan direalisasikan dalam bentuk program kerja, meliputi; *hisbah*, *halaqoh*, *syahriahan*, seminar pendidikan, musyawarah wilayah, dan pengiriman utusan untuk menjadi relawan bencana alam yang kesemuanya itu dilakukan sebagai upaya menegakkan "*amar mar'uf nahi munkar*". Relevansi strategi yang dilakukan dengan pembangunan nilai kebangsaan terletak pada aktivitas yang dilakukan FPI, yakni menunjukkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, kebanggaan bertanah air Indonesia, mengajarkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang dapat merugikan bangsa dan negara, mengajarkan nilai kesetiaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengajarkan perilaku yang mencerminkan jiwa dan kepribadian Indonesia.
- c. Hambatan yang ditemui FPI dalam upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan meliputi beberapa aspek. *Pertama*, adanya pelabelan Ormas Islam FPI sebagai Ormas anarkis dan radikal. *Kedua*, masyarakat hanya memahami FPI sebagai Ormas penegak agama, tanpa ada relevansi dengan pembangunan masyarakat. *Ketiga*, pemberitaan media yang cenderung



mendiskreditkan posisi FPI. *Keempat*, keberadaan oknum pejabat yang berdiri di belakang tempat-tempat maksiat. *Kelima*, adanya perbedaan persepsi dan pemahaman tentang arti pentingnya nilai-nilai kebangsaan serta sulitnya menyamakan persepsi mengenai arah aktivitas dan orientasi yang hendak dicapai. *Keenam*, miskinnya figur pemimpin di lingkup masyarakat Kabupaten Purwakarta. *Ketujuh*, terbatasnya dana untuk melaksanakan kegiatan. *Kedelapan*, belum terpadunya sistem pengkaderan dan diklat yang dilaksanakan. *Kesembilan*, adanya perbedaan tingkat kemampuan berpikir antar anggota. *Kesepuluh*, terpaan globalisasi dan westernisasi yang menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. *Kesebelas*, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

- d. Beberapa upaya yang dilakukan Ormas Islam FPI dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam pengembangan nilai-nilai kebangsaan meliputi; *Pertama*, membangun sinergitas dengan aparat kepolisian, Satpol PP dan masyarakat terutama dalam melakukan razia dan *sweeping* ke tempat-tempat yang dinilai meresahkan masyarakat. *Kedua*, menggalakkan sosialisasi aktif kepada masyarakat melalui dakwah dari tokoh-tokoh FPI baik melalui pengajian umum (mimbar) maupun pengajian-pengajian rutin pada skala yang lebih kecil. *Ketiga*, menekankan pentingnya musyawarah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungannya, sehingga ketika ada masalah tidak langsung menyulut emosi. *Keempat*, memperkuat komitmen anggota dan pengurus FPI untuk senantiasa konsisten dalam melaksanakan aktivitas atau program kerja, terutama dalam rangka membangun nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR RUJUKAN

Budimansyah, D. (2010). *Tantangan Globalisasi Terhadap Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air di Sekolah*. Bandung: Jurnal

Penelitian Pendidikan Vol. 11, No. 1, April 2010.

- Hastuti, N. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Nasionalisme Bangsa*. Jakarta : Media Bangsa
- Komalasari, K. (2007). *Revitalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan*. Jurnal Civics, Volume I, Nomor 8, Juni 2007.
- Lestiyarini, B. (2012). *Penumbuhan Semangat Kebangsaan Untuk Memperkuat Karakter Indonesia Melalui Pembelajaran Bahasa*. Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun II, Nomor 3, Oktober 2012.
- Lickona, T. (1992). *Educating For Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York-Toronto-London-Sydney-Auckland: Bantam Books.
- Naisbitt, J. (1994). *Global Paradox*. Alih bahasa Budijanto. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Ninin & Listya. (2003). *Radikalisme Agama Sebagai Salah Satu Bentuk Perilaku Menyimpang: Studi Kasus Front Pembela Islam*. Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 3, Nomor I, Juni 2003.
- Nugraha, M, dkk.(2011). *Pengkajian Hukum tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Sari, NY.(2003). *Potensi Opini Publik Terhadap Eksistensi Ormas & Partai Islam*. Jurnal Sosial dan Pembangunan MIMBAR, Volume 19, No. 1, Tahun 2003.
- Sutarto. (1992). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Taufiq, A. (2008). *Dinamika Sastra Multikultural: Revitalisasi Nilai dalam Dimensi Kebangsaan*. Jurnal Kultur Edisi 2, Agustus 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.